

Faktor-faktor Penyebab Transformasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Aram Palilu

Universitas Victory Sorong
arampalilu1015@gmail.com

Abstrak

Pembangunan yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang komprehensif dan terintegral, terutama terkait penataan ruang secara spasial tentu menimbulkan masalah. Masalah itu terkait dengan penggunaan tanah yang tidak efektif sesuai potensi objektif peruntukannya. Perencanaan penggunaan tanah yang tidak efektif akan menyebabkan terjadinya pencaplokkan tanah yang potensial untuk proses produksi kebutuhan pokok manusia menjadi terbatas (langka), seperti pangan dan palawija. Konsekuensinya dari kelangkaan pangan maupun palawija maka diikuti inflasi sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang konsumtif atau bergantung terhadap kebutuhan pokok berupa pangan dan palawija dari luar. Akhirnya tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak karena adanya inflasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian adalah berupa data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen. Sampel didasarkan dengan sistem purposive sampling. Analisis terhadap data penelitian menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya transformasi lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara masif terutama di pinggiran kota maupun perdesaan. Akibatnya lahan-lahan pertanian yang produktif berubah menjadi lokasi pusat-pusat pemukiman penduduk, bisnis, perkantoran, pendidikan dan industri. Hal ini disebabkan terjadinya pertambahan jumlah penduduk, infrastruktur jalan yang handal, terbatasnya kapasitas bendungan dan sistem irigasi, tekstur tanah yang labil, harga tanah yang tinggi, dan pendapatan yang rendah dari pengolahan lahan pertanian.

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan, Pertambahan Penduduk, Infrastruktur Jalan, Bendungan dan Sistem Irigasi, Tekstur Tanah, Pendapatan Petani, Harga Tanah

Abstract

Development carried out without comprehensive and integrated planning, especially related to spatial arrangement certainly causes problems. The problem is related to the ineffective use of land according to its objective potential. Planning for ineffective land use will cause the potential annexation of land for the production process of human staples to be limited (rare), such as food and palawija. The consequences of food scarcity and palawija are followed by inflation as a result of consumptive people's behavior or depending on basic needs in the form of food and palawija from outside. Finally, it cannot be satisfied will affect the level of public welfare either directly or indirectly because of inflation. This research uses qualitative methods. Research data sources are primary and secondary data. Data is obtained through interviews, observai and documents. The sample is based on a purposive sampling system. Analysis of the research data using miles and hubermann models. The results showed that the transformation of agricultural land from year to year experienced a massive increase, especially in the suburbs and rural areas. Akibatnya lahan-lahan pertanian yang produktif berubah menjadi lokasi pusat-pusat pemukiman penduduk, bisnis, perkantoran, pendidikan dan industri. Hal ini disebabkan terjadinya pertambahan jumlah penduduk, infrastruktur jalan yang handal, terbatasnya kapasitas bendungan dan sistem irigasi, tekstur tanah yang labil, harga tanah yang tinggi, dan pendapatan yang rendah dari pengolahan lahan pertanian.

Keywords: Land Transfer, Population Growth, Road Infrastructure, Dams and Irrigation Systems, Soil Texture, Farmer Income, Land Pric

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan tanpa sebuah perencanaan yang baik, dapat dipastikan hasil pembangunan juga tertata (berpola) seperti yang diidealkan, terutama dalam penatausahaan ruang dalam suatu kawasan. Penatausahaan ruang harus ditelaah secara spasial namun terintegrasi dalam upaya perencanaannya agar terciptanya harmonisasi dan sinergitas penggunaan lahan yang efektif. Diharapkan dengan efektivitas penggunaan ruang menjadi maksimal berdasarkan potensi objektif peruntukkan lahan tertentu didalam suatu kawasan.

Sehubungan dengan itu, dengan adanya rencana tata ruang maka peruntukkan bidang-bidang tanah harus disesuaikan dengan rencana tata ruang tersebut. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang menyerasikan rencana tata ruang dengan kondisi bidang-bidang tanah dari aspek fisik, ekonomi, status tanah, kelestarian lingkungan, pertanian, dan sebagainya. Dari segi penggunaan tanah antara pinggiran kota dan perdesaan, jelas sangat berbeda karena tanah dapat berperan multi fungsi. Penggunaan tanah perkotaan lebih intensif dan dikonsentrasikan untuk pemukiman, perdagangan, industri, perkantoran dan jasa (*services*). Sedangkan tanah perdesaan lebih difokuskan untuk kegiatan pertanian^[1].

Namun kenyataannya, kasus di Negara-negara Sedang Berkembang (NSB) seperti di Indonesia, belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan terutama penataan ruang di sektor pertanian. Padahal, kita tahu bahwa di NSB, sektor pertanian masih menjadi primadona dalam menghasilkan kebutuhan pokok di daerah itu maupun untuk daerah yang lain, terutama dalam ketahanan pangan.^[2] Artinya, sektor pertanian masih relatif tinggi kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja maupun pembentukan Produk Nasional Bruto/PNB (*Gross Domestic Product/GDP*). Karena itu peran perencanaan tata ruang yang terukur sebagai sebuah solusi yang tepat. Dengan kata lain, perencanaan selalu dihubungkan dengan faktor letak geografis, bangunan tempat tinggal, tata ruang dan lainnya.^[3]

RTRW merupakan pemetaan ruang yang didasarkan pada fungsi penggunaannya, seperti dimana ruang untuk kawasan permukiman penduduk, pusat industri, perkantoran, pendidikan, pertanian, hutan lindung, kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan lainnya. Bila demikian, maka dapat diminimalisir penggunaan lahan yang tak berdasarkan potensi objektif dari suatu kawasan.

Berdasarkan definisi dari alih fungsi lahan merupakan konversi fungsi sebagian maupun seluruh lahan pertanian yang sebenarnya telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun ada kesadaran tentu memberikan efek yang tidak diinginkan^[3]. Lahan-lahan pertanian yang produktif justru subur disulap menjadi pusat-pusat permukiman penduduk, perkantoran, dan industri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya perebutan lahan antara sector pertanian dengan bukan pertanian dalam memanfaatkan lahan untuk tujuan tertentu^[4].

Secara teoritik perencanaan tata ruang (*land use planning*) adalah mencakup perencanaan penggunaan lahan atau tata guna tanah dan juga tata ruang.^[5] Secara teknis, pengelolaan ruang maka harus ada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Melalui RTRW, dapat dipetakan secara spasial suatu ruang berdasarkan potensi objektifitas suatu kawasan, khususnya ruang perkotaan maupun perdesaan. Hal yang perlu diperhatikan supaya kapasitas ruang dari suatu perkotaan dan/atau perdesaan dapat diwujudkan tanpa harus mengorbankan potensi spasial dari kawasan tertentu.

RTRW merupakan pemetaan ruang yang didasarkan pada fungsi penggunaannya, seperti dimana ruang untuk kawasan permukiman penduduk, pusat industri, perkantoran, pendidikan, pertanian, hutan lindung, kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan lainnya. Bila demikian, maka dapat diminimalisir penggunaan lahan yang tak berdasarkan potensi objektif dari suatu kawasan. Walaupun telah dilakukan pemetaan kawasan berdasarkan RTRW, kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi penyalahgunaan ruang tertentu, terutama di sektor pertanian.

Perencanaan pembangunan regional disuatu kawasan, seharusnya menciptakan hubungan fungsional antara kota dan perdesaan. Kota sebagai pusat pelayanan selalu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya, dimana wilayah sekitarnya berkaitan langsung dengan wilayah *hinterland*. *Hinterland* dimaknai sebagai wilayah perdesaan, namun dalam jangka waktu tertentu perdesaan akan mengalami proses perubahan dari semula adalah desa (*rural*) menjadi bercirikan perkotaan (*urban*) baru^{[1][6]}.

Efek dari adanya perkotaan urban baru adalah pembangunan semakin masif dan telah menjadi daya tarik berbagai industri karena tempat pemasaran barang dan jasa yang potensial. Di lain pihak, bagi para tenaga kerja kota dijadikan pasar taruahan untuk mendapatkan pekerjaan yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan profesi mereka sebelumnya di tempat asal dengan bermigrasi ke pusat-pusat kota. Akhirnya kota dalam jangka waktu tertentu kota telah berkembang pesat dan dapat

menimbulkan sebuah masalah bila tidak diimbangi dengan perencanaan yang terkontrol secara ketat melalui sebuah perencanaan komprehensif dan terpadu.

Selain itu bila alih fungsi lahan ini tidak ada sebuah kebijakan yang berfungsi sebagai pengendali agar tidak semakin mempercepat alih fungsi lahan yang terjadi beberapa tahun kemudian. Bila aspek ini dibiakan dalam waktu relatif singkat, maka kota akan menjadi *over* kapasitas karena ketidakmampuan institusi perencana untuk memprediksi sebelumnya. Akhirnya, pembangunan berjalan secara alami dan tidak tertata dengan baik.

Akibatnya, pembangunan akan berkembang ke berbagai menyebar ke segala arah termasuk perdesaan. dan dipastikan sebuah perkembangan akan menyebabkan permintaan lahan semakin tinggi pula, padahal tanah adalah tetap^[7]. Konsekuensi logis dari semua rentetan masalah tersebut adalah lahan-lahan yang ada di pinggiran perkotaan dan perdesaan merupakan sebuah alternatif mutlak sebagai pembenaran terhadap sebuah perencanaan yang gagal.

Permasalahan ini harus ditangani melalui kebijakan yang holistik dan terintegral agar konversi lahan pertanian yang produktif tidak terjadi secara masif, karena adanya penambahan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur transportasi jalan yang semakin handal, harga tanah yang semakin mahal, pendapatan petani dari pengusahaan lahan pertanian rendah, dan infrastruktur dasar bendungan maupun irigasi yang tidak memadai.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimanakah permasalahan tersebut dapat mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sorong? Sedangkan tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sorong.

Berkaitan dengan itu, maka peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut: "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Transformasi Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sorong"

2. METODE

Penelitian ini berlokasi di Distrik Aimas, Mariat, Mayamuk, dan Salawati Kabupaten. Lokasi ini dipilih karena di Distrik-Distrik tersebut merupakan lahan-lahan pertanian para transmigrasi nasional dan cukup tinggi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Sampel penelitian didasarkan pada: Pertama *snow Ball sampling*, adalah pengambilan informasi/data diperoleh dengan cara menggiling dari satu orang ke orang lain sampai pada titik jenuh tertentu. Kedua *purposive sampling*, dimana

dalam memperoleh informasi atau data berdasarkan pertimbangan tertentu karena terkait kelayakan validitas dan akurasi data.^[5] Teknik pengumpulan data diperoleh melalui: 1) survei/observasi, yang disurvei adalah infrastruktur jalan, prasarana bendungan dan sistem irigasi, lokasi/lahan pertanian yang tidak produktif dan maupun lahan yang telah dikonversi menjadi lahan nonpertanian. 2) Wawancara, cara mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung kepada informan yang ada di lapangan yang meliputi: (a) tingkat pendapatan rata-rata para petani dikali jumlah musim panen dalam satu tahun; (b) tekstur tanah yang labil; (c) dan harga tanah.

Berdasarkan data yang ada, kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi: *Data Condensation* (Kondensasi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Penarikan Kesimpulan* (*Conclusion Drawing* *Verifying*). Sedangkan terkait dengan Keabsahan data (Uji Kredibilitas Data), meliputi: 1) Kredibilitas (*Credibility*), dengan cara memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, dan triangulasi; 2) *Transferability* atau Keteralihan (*Transferability*); 3) Ketergantungan (*Dependability*); 4) Konfirmabilitas atau Kepastian (*Confirmability*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu diketahui bahwa, tidak semua data yang ada Distrik dan Kelurahan/Kampung dijadikan perhitungan pertambahan jumlah penduduk, panjang dan lebar jalan, dan luas lahan pertanian di Kabupaten Sorong. Hal ini ditempuh karena pertimbangan bahwa Distrik dan Kelurahan/Kampung yang lain belum menunjukkan ada alih fungsi lahan pertanian. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya transformasi lahan pertanian adalah di Kabupaten Sorong adalah:

a. Pertambahan Jumlah Penduduk

Berikut peningkatan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga dari tahun 2014 - 2020

Tabel 1
Pertambahan Jumlah Penduduk Distrik Aimas, Mariat, Mayamuk dan Salawati

Thn	Jlh Pddk	%	Jlh KK	%
2020	49.243	18,11	18.025	21,61
2019	45.882	16,87	15.970	19,14
2018	41.770	15,36	13.075	15,67
2017	38.871	14,29	11.387	13,65
2016	35.274	12,97	9.860	11,81
2015	32.305	11,88	8.357	10,02
2014	28.589	10,51	6.759	8,10
Total	271.934	100	83.427	100

Rerata	38.848	14,29	11.918	14,29
--------	--------	-------	--------	-------

Sumber data: Hasil Olahan Data yang Disesuaikan dengan Kebutuhan analisis

Berdasarkan data jumlah penduduk pada Tabel 1, terjadi peningkatan jumlah penduduk cukup tinggi setiap tahun adalah rata-rata 14,29 persen, sedangkan luas lahan pertanian tidak bertambah (tetap). Observasi selama dilokasi penelitian, Distrik Aimas yang sangat tinggi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Dapat dilihat dimana lebih dari separuh lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi pusat-pusat pemukiman penduduk, perdagangan, perkantoran, industri dan lainnya.

Berikutnya, Distrik Mariat juga mengalami pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga kebutuhan akan lahan baru untuk pemukiman penduduk, perkantoran, industri, pendidikan, bisnis, dan lainnya otomatis memerlukan lahan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di Distrik Mariat telah bermunculan pihak pengembang (ada3) perumahan di beberapa lokasi pertanian, pusat-pusat perdagangan/bisnis, pendidikan dan industri. Sedangkan 2 distrik yaitu Mayamuk dan Salawati pertambahan penduduk belum begitu tinggi tapi alih fungsi lahan juga cukup tinggi karena tidak digarap.

Berikut beberapa foto lokasi lahan pertanian telah dikonversi menjadi pemukiman penduduk yang dibangun pengembang (*developer*) yang ada dilokasi transmigrasi.



Salah satu lokasi pemukiman penduduk di Distrik Aimas (Foto diambil Bulan Awal Nopember 2021).



Salah satu lokasi pemukiman penduduk di distrik Mariat (Foto diambil Bulan Awal Nopember 2021).

b. Infrastrukturu Jalan

Perhitungan panjang jalan dan lebar jalan yang dijadikan dasar penambahan jalan adalah yang dibangun diatas tahun 2005. Hal ini dimaksudkan karena pembangunan infrastruktur jalan yang baru (bukan jalan lama) cukup genjar dilaksanakan. Adapun panjang dan lebar jalan (dihitung dari batas sanitasi terluar jalan baik nasional, provinsi dan kabupaten, adalah sebagai berikut

Tabel 2:

Panjang dan Lebar Jalan Tahun 2005- 2020.

Jalan	Pjg (Km)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Ha (M ²)
Nas	4		72.000	7,2
Prov	35	16	560.000	56
Kab	49	12	558.000	55,8
Total	88	46	1.000.000	119

Sumber Data: Hasil Olahan Data yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Analisis

Bila memperhatikan data pada tabel 2, diketahui bahwa infrastruktur jalan secara langsung telah mengurai lahan pertanian dihitung dari pinggir terluar sanitasi jalan sehingga diperoleh seluas 119 Ha, karena melewati lahan pertanian. Sedangkan secara tidak langsung adalah terjadinya permintaan dan penawaran terhadap tanah untuk kebutuhan pemukiman maupun kebutuhan lainnya karena lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis ini adalah sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas sebagai daya tarik tersendiri terutama untuk pemukiman dan perdagangan/bisnis. Data menunjukkan bahwa jalan provinsi adalah yang paling tinggi mencaplok lahan pertanian.

Hasil observasi, Distrik Aimas yang sangat tinggi terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang disumbangkan dari pembangunan jalan yang handal, disusul Distrik Mariat, Mayamuk dan Salawati. Dampak negatifnya dengan adanya infrastruktur jalan terhadap lahan pertanian memperparah banjir di lahan pertanian karena lebih tinggi dari pada lahan pertanian. Akibatnya para petani merasa rugi dan tidak bergairah lagi untuk mengolah lahan pertaniannya.

Beberapa Contoh infrastruktur jalan yang melewati lahan pertanian yang melintasi lahan pertanian.



Salah Infrastruktur Jalan yang melintasi lahan pertanian di Distrik Mariat (Foto diambil Bulan Awal Nopember 2021).



Salah Infrastruktur Jalan yang melintasi lahan pertanian di Distrik Aimas (Foto diambil Bulan Awal Nopember 2021).



Salah satu contoh pengambilan gambar yang tidak digarap di Distrik Aimas Salah Infrastruktur Bendungan di Distrik Mariat (Foto diambil Bulan Awal Nopember 2021).

c. Infrastruktur Bendungan dan Sistem Irigasi

Berdasarkan hasil observasi, infrastruktur bendungan dan sistem irigasi yang sangat terbatas jumlahnya dan tidak berfungsi. Dari 4 Distrik di lokasi transmigrasi ternyata ada 3 bendungan, 2 bendungan ada di Distrik Mariat namun hanya 1 yang berfungsi, namun sangat terbatas daya tampungnya untuk mengairi lahan pertanian di musim kemarau. Hal ini, karena sistem jaringan irigasi primer, panjangnya hanya sepanjang sekitar ± 500 M. Jaringan irigasi sekunder dan tersier tidak ada secara permanen. Sehingga luas lahan yang dialiri air dari bendungan hanya ± 15 Ha.

Bendungan ini ada di Kelurahan Klamalu Distrik Mariat. Pada hal luas lahan pertanian seluas ± 125 Ha yang perlu dialiri air bila musim kemarau. Bendungan kedua sama sekali tidak berfungsi karena jaringan irigasinya tidak ada, baik yang primer, sekunder maupun tersier. Padahal luas lahan yang harus di aliri air di Kelurahan Klamalu Distrik Mariat ± 170 Ha. Hal yang sama untuk bendungan yang ketiga yang berada di Katapop 2, juga tidak berfungsi dengan baik.

Akibat dari terbatasnya bendungan dan sistem irigasi, maka produktivitas para petani tidak maksimal. Contoh perbandingan, bila suatu sawah dialiri air yang cukup di musim kemarau produktivitas para petani dapat mencapai 12 ton gabah kering per Ha. Kenyataannya karena ketersediaan air sangat terbatas maka produktivitas para petani dibawah 4 ton per Ha. Di musim hujan atau kemarau para petani lebih memilih untuk bercocok tanam sayur-sayuran, rica, jagung, dan lain sejenisnya. Bila dibandingkan, hasilnya lebih lumayan walaupun tidak berbeda jauh dengan padi.

Contoh kondisi beberapa bendungan yang tidak berfungsi lagi karena sistem irigasi sudah tertimbun oleh tanah dan telah berpuluh tahun tidak berfungsi.



Salah Infrastruktur jaringan irigasi yang tidak ada jaringan sekunder dan tersier di Distrik Mariat (Foto diambil Bulan Awal Nopember 2021).

d. Tekstur Tanah yang Labil

Ada yang unik di beberapa lokasi lahan pertanian dimana bila musim hujan, tanah sama sekali susah disesuaikan dengan komoditi yang akan ditanam oleh para petani karena berawa dan cukup dalam. Dan berdasarkan wawancara dengan penduduk pribumi, bahwa dulu sebelum lahan ini mengendap maka bila air laut pasang maka tanah tersebut digenangi oleh air laut, bila terjadi air laut pasang (naik). Namun, karena proses pengendapan yang cepat maka terbentuklah lahan datar, dan dijadikan sebagai lokasi pemukiman transmigrasi.

Sedangkan dimusim kemarau, sangat susah mendapatkan air karena tanahnya muda panas dan kering sehingga tanaman harus disiram 1 sampai 2 kali sehari. Walaupun tanaman telah disiram, hasil/produksi tanaman tidak maksimal. Akhirnya, hasil antara musim hujan dan kemarau adalah relatif sama sehingga para petani lebih memilih menelantarkan lahan-lahannya untuk tidak diolah dan terbukti dilapangan lebih banyak lahan yang tidak digarap (lebih dari $\frac{1}{2}$). Banyak petani yang telah beralih profesi yang dianggap dapat menjamin kehidupan keluarganya seperti profesi sopir, bisnis, kerja di perusahaan/industri, dan lainnya.

Beberapa bukti lahan pertanian yang terlantar karena prasarana kebutuhan air dan tekstur tanah yang labil.



Salah satu contoh pengambilan gambar yang tidak digarap di Distrik Aimas Salah Mariat (Foto diambil Bulan Awal Nopember 2021).



Salah satu contoh pengambilan gambar yang tidak digarap di Distrik Aimas Salah Infrastruktur Bendungan di Distrik Mariat (Foto diambil Bulan Awal Nopember 2021).

e. Tingkat Pendapat Rendah

Perhitungan pendapatan bersih para petani dikalikan periode panen sehingga pendapata para petani rata-rata di tahun 2021 adalah seperti pada tabel 3. Data pendapatan rata-rata para petani diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa para petani di lokasi distrik yang berbeda. Sedangkan untuk memperoleh pendapatan rata-rata yang non petani (sector lain, seperti di sektor industri atau perusahaan) adalah berdasarkan Upah Minimum Regional di Provinsi Papua Tahun 2021. Berikut perbandingan pendapatan bersih rata-rata antara para petani dengan non petani (sopir, pegawai di industri, bisnis, dan lainnya) selama 1 tahun.

Tabel 3.
Perbandingan Pendapatan Petani dengan Non Petani

Profesi	Pendapatan 1 Tahun (Rp)	
	Periode Pendapatan	Total
Tani	3 kali: @ Rp 9.200.000	27.600.000
Non Tani	12 Bulan: @ Rp 3.134.600	37.615.200

Sumber Data: Hasil Olahan data Primer

Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara para petani dengan yang non petani (di sektor lain) adalah cukup tinggi dalam setahun. Perbedaan antara para petani dengan non petani adalah sebesar Rp 10.015.200 (sepuluh juta lima belas ribu dua ratus rupiah). Dan bila

pendapatan total para petani dilihat perbulannya maka besaran adalah Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sebuah pendapatan yang memprihatinkan untuk menghidup sebuah keluarga yang rata-rata 3 – 4 orang.

Hal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi di sektor pertanian cukup tinggi yang terdiri dari pupuk, obat-obatan dan terbatasnya infrastruktur yang mendukung produktivitas meningkat.

f. Harga Tanah

Harga tanah yang relatif tinggi sangat ditentukan adanya permintaan tanah cukup tinggi. Hal ini karena ditentukan pula oleh kualitas dan kuantitas (panjang, lebar, dan beton/aspal) infrastruktur jalan yang ada di distrik Aimas, Mariat, Mayamuk dan Salawati baik berupa jalan nasional, provinsi dan kabupaten yang pembangunannya melintasi lahan-lahan pertanian yang saling bertemu atau berpotongan antara yang satu dengan yang lain dan jaraknya relatif berdekatan yaitu $\pm 0,5 - 1$ Km. Dengan demikian memicu permintaan dan penawaran terhadap tanah juga tinggi.

Permintaan tanah tinggi untuk kebutuhan pemukiman penduduk, perdagangan ataupun bisnis tentu berhubungan linear dengan harga tanah yang tinggi pula. Harga yang tinggi lahan yang tidak memberikan pendapatan yang memadai maka para petani lebih memilih untuk dijual dan dapat digunakan sebagai modal untuk alih profesi. Semua ini karena terjadi karena pendapatan dari olahan lahan pertanian yang tidak didukung oleh prasarana yang memadai, dan tekstur tanah yang labil.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, meliputi:

Transformasi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman penduduk karena adanya pertambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi sebagai akibat .

Pembangunan infrastruktur jalan yang handal baik yang terkait dengan kualitas maupun kuantitas menjadi pemicu salah satu terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Keterbatasan infrastruktur bendungan dan sistem jaringan irigasi merupakan penyebab terjadinya konversi lahan pertanian. Setiap lahan-lahan pertanian mutlak membutuhkan persediaan air yang cukup untuk meningkatkan produksi pangan maupun palawija.

Produksi yang tinggi selalu mempengaruhi pendapatan yang tinggi pula. Sedangkan produktivitas berbanding lurus dengan tersedianya prasarana untuk pendistribusian air secara memadai.

Harga tanah yang relatif tinggi telah mendorong penawaran tanah untuk dijual, karena tanah tidak produktif. Sedangkan permintaan yang tinggi terhadap tanah karena adanya pertambahan penduduk dan infrastruktur jalan yang handal.

Tekstur tanah yang labil tentu mempengaruhi tingkat produksi yang rendahnya. Di musim hujan tanah berupa rawa yang dalam dan di musim kemarau, tanah mengeras dan retak serta panas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sadyono, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah: Realita dan Tantangan, Bumi Aksara, Jakarta.
- [2] Rupini, A. A. Ayu Dyah., dkk. 2017. Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Perkembangan Spasial Daerah Pinggiran Kota, Denpasar, Undagi Jurnal Ilmiah Arsitektur, Volume 5, Nomor 2, p-ISSN 2338-0454 (printed), e-ISSN 2581-2211.
- [3] Indrianawati, Nadhiya D. Mahdiyyah 2019 Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2016 Jurusan Teknik Geodesi FTSP - Institut Teknologi Nasional, Bandung. Reka Geomatika No.1 | Vol. 2019 | 21-29 ISSN 2714-7401.
- [4] Budi dan Irawan Dalam Zara Rosalia . 2015. Analisis Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2003-2013, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman Eko-Regional, Vol.10, No.1.
- [5] Rustiadi, Ernan; dkk. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- [6] Tarigan, Robinson. 2012. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- [7] Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- [8] Abipraja, Soedjono. 2002. Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.